

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO



Catatan Atas Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Semester II dan Tahunan TA. 2022 (Audited)

KPU Provinsi Gorontalo

Jl. Tinaloga No. 24, Desa Toto Utara
Kec. Tilongkabila, Kab. Bone Bolango
Telp. 0435 830853
Email. provgorontalokpu@gmail.com



Laporan Keuangan Tahunan (Audited) 2022

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022


KATA PENGANTAR


Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Gorontalo, 8 Mei 2023
SEKRETARIS

Drs. Mukti Abdullatif Mile, M.Si
★ **NIP. 197201241992031002**



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	
II Neraca	
III Laporan Operasional	
IV Laporan Perubahan Ekuitas	
V Catatan Atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	9
B.1 Pendapatan	
B.1.2 Penerimaan Pajak	
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	14
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.19 Tanah	
C.20 Tanah Belum Diregister	
C.21 Peralatan dan Mesin	
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.23 Gedung dan Bangunan	
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
C.27 Aset Tetap Lainnya	
C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister	
C.29 Konstruksi Dalam Pengerjaan	ii

C.30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
C.32	Aset Tak Berwujud	
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
C.34	Aset Lain-lain	
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	
C.42	Uang Muka dari KPPN	
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.44	Ekuitas	
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	25
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2	Beban Pegawai	
D.3	Beban Persediaan	
D.4	Beban Barang dan Jasa	
D.5	Beban Pemeliharaan	
D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	29
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	30
VI.	Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Gorontalo, 8 Mei 2023
SEKRETARIS



Drs. Mukti Abdullatif Mile, M.Si
NRP. 197201241992031002

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 31 Desember sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4,120,244 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp4,120,244 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp17,260,567,132 atau mencapai 0.00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp0.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp6,482,241,976 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp6,187,920; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp6,451,395,694 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp24,658,362.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp6,482,241,976

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp370,100 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp17,369,437,633 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-17,369,067,533, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp3,750,144 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-17,365,317,389.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6,591,112,477, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-17,365,317,389 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 17,256,446,888 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp6,482,241,976

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

URAIAN	Catatan	TA 2022		% thd Angg	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	-	4,120,244	-	41,785,174
JUMLAH PENDAPATAN		-	4,120,244	-	41,785,174
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	-	4,304,240,307	-	3,802,236,780
Belanja Barang	B.2.2	-	12,746,676,825	-	2,570,553,355
Belanja Modal	B.2.3	-	209,650,000	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		-	17,260,567,132	-	6,372,790,135

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

U R A I A N	Catatan	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.2	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.3	-	-
Persediaan	C.4	6,187,920	6,187,920
Persediaan yang Belum Diregister	C.5	-	-
Jumlah Aset Lancar		6,187,920	6,187,920
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.21	1,511,165,775	1,511,165,775
Tanah Belum Diregister	C.22	-	-
Peralatan dan Mesin	C.23	2,847,143,223	3,280,904,219
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.24	-	-
Gedung dan Bangunan	C.25	5,188,267,300	5,188,267,300
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.26	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.27	23,039,080	23,039,080
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.28	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.29	-	-
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.30	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.31	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.32	(3,118,219,684)	(3,438,866,104)
Jumlah Aset Tetap		6,451,395,694	6,564,510,270
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.33	-	-
Aset Tak Berwujud	C.34	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.35	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.36	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.37	-	-
Aset Lain-lain	C.38	1,120,982,946	477,571,950
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.39	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.40	(1,096,324,584)	(437,807,663)
Jumlah Aset Lainnya		24,658,362	39,764,287
JUMLAH ASET		6,482,241,976	6,610,462,477
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.41	-	19,350,000
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.42	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.43	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.44	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.45	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.46	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.47	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	19,350,000
JUMLAH KEWAJIBAN		-	19,350,000
EKUITAS			
Ekuitas	C.48	6,482,241,976	6,591,112,477
JUMLAH EKUITAS		6,482,241,976	6,591,112,477
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		6,482,241,976	6,610,462,477

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	370,100	75,874
Jumlah Pendapatan		370,100	75,874
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	4,284,890,307	3,821,586,780
Beban Persediaan	D.4	5,000,000	60,203,349
Beban Barang dan Jasa	D.5	6,110,813,762	1,209,211,337
Beban Pemeliharaan	D.6	1,506,735,670	376,754,039
Beban Perjalanan Dinas	D.7	5,124,127,393	924,384,630
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	337,870,501	403,234,075
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Jumlah Beban		17,369,437,633	6,795,374,210
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(17,369,067,533)	(6,795,298,336)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	3,750,100	227,800
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	44	41,481,500
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		3,750,144	41,709,300
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(17,365,317,389)	(6,753,589,036)
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan Rusak/Usang		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(17,365,317,389)	(6,753,589,036)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	6,591,112,477	6,199,145,177
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(17,365,317,389)	(6,753,589,036)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	(15,519,400)
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	(15,519,400)
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		-	(15,519,400)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	17,256,446,888	7,161,075,736
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(108,870,501)	391,967,300
EKUITAS AKHIR	E.6	6,482,241,976	6,591,112,477

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

A.1.1 KEANGGOTAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota.

Komisioner KPU Provinsi Gorontalo sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota Komisioner dengan susunan sebagaimana berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
5. Divisi Hukum dan Pengawasan

A.1.2 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

Susunan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yaitu terdiri dari :

1. Sekretaris
2. Kepala Bagian Hukum dan SDM
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Data
4. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
5. Kepala Subbagian SDM dan Organisasi
6. Kepala Subbagian Data dan Informasi
7. Kepala Subbagian Hukum
8. Kepala Subbagian Teknis & Hupmas
9. Kepala Subbagian Keuangan
10. Kepala Subbagian Umum dan Logistik

A.1.3 VISI, MISI DAN TUJUAN

Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

Misi

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

A.1.4 NILAI-NILAI DASAR DAN LINGKUP TUGAS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo memiliki Tugas, Wewenang dan Kewajiban yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tugas KPU Provinsi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
4. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
7. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Provinsi berwenang:

1. Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
2. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
3. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
4. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Provinsi berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi;
10. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
11. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarhal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2022	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	4,332,306,000	-
Belanja Barang	13,230,838,000	-
Belanja Modal	209,800,000	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	17,772,944,000	-

Realisasi
Pendapatan
Rp4,120,244

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4,120,244 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp4,120,244. Pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya Terdapat Penurunan Realisasi Pendapatan per tanggal 31 Desember 2022, dikarenakan pada tahun anggaran 2021 KPU Provinsi telah menyelesaikan temuan Pemeriksaan BPK Tahun 2019. Sehingga nilai pendapatan pada tahun 2022 terdapat penurunan dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	4,120,244	-
Jumlah	-	4,120,244	-

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami penurunan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 90.14 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	4,120,244	41,785,174	(90.14)
Jumlah	4,120,244	41,785,174	(90.14)

Realisasi

B.1.1 Penerimaan Pajak

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Jumlah	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	-	-	-

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4,120,244 dan Rp41,785,174. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2022 mengalami penurunan sebesar 90.14 dari TA 2021. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	4,120,244	41,785,174	(90.14)
Jumlah	4,120,244	41,785,174	(90.14)

Sedangkan Rincian PNPB Lainnya adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian PNPB Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3,750,100	227,800	1,546.22
Pendapatan Anggaran Lain-lain	370,100	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	44	1,400	(96.86)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	41,480,100	(100.00)
Jumlah	4,120,244	41,785,174	(90.14)

- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya merupakan hasil dari penjualan Bilik Suara dan penjualan/lelang Barang Inventaris (BMN), dengan rincian sebagai berikut:

1. Penjualan/Lelang bilik sebesar Rp 2.250.000
2. Penjualan/Lelang BMN sebesar Rp 1.500.100

- Pendapan Anggaran Lain-lain senilai Rp 370.100 merupakan pendapatan atas penerimaan kembali selisih gaji pegawai

- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL senilai Rp 44,- merupakan pendapatan yang diperoleh dari Pembulatan selisih kekurangan gaji pegawai yang dipotong dan disetor langsung melalui KPPN.

- Bukti penjualan/lelang barang-barang sebagaimana dimaksud disajikan sebagaimana pada lampiran CALK.

B.2 Belanja

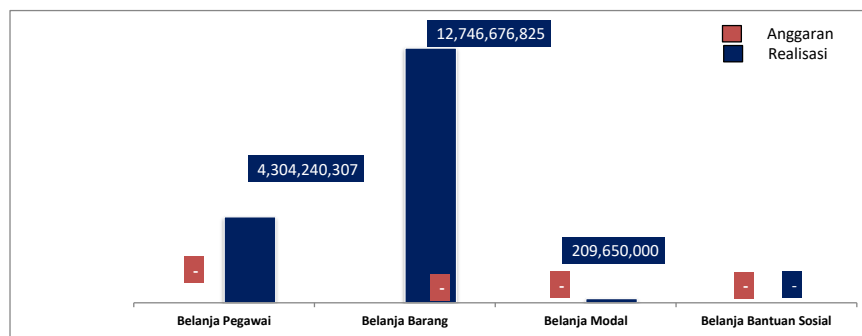
Realisasi Belanja pada TA 2022 adalah sebesar Rp17,260,567,132 atau 0.00 % dari anggaran belanja sebesar Rp.0 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2022

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	-	4,304,240,307	-
Belanja Barang	-	12,746,676,825	-
Belanja Modal	-	209,650,000	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	17,260,567,132	-

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2022



Dibandingkan dengan TA 2021, Realisasi Belanja TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 170.85%. Terdapat kenaikan belanja pegawai pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 dikarenakan adanya

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Pegawai	4,304,240,307	3,802,236,780	13.20
Belanja Barang	12,746,676,825	2,570,553,355	395.87
Belanja Modal	209,650,000	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	17,260,567,132	6,372,790,135	170.85

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4,304,240,307 dan Rp3,802,236,780. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 13.20 % dari TA 2021. Hal ini disebabkan Adanya kenaikan belanja pegawai dikarenakan adanya pegawai baru (CPNS) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1,176,769,180	756,866,720	55.48
Belanja Pembulatan Gaji PNS	20,690	14,575	41.96
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	78,956,424	45,902,986	72.01
Belanja Tunj. Anak PNS	23,740,618	11,678,720	103.28
Belanja Tunj. Struktural PNS	140,540,000	110,750,000	26.90
Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Belanja Tunj. PPh PNS	6,330,130	4,742,295	33.48
Belanja Tunj. Beras PNS	66,336,720	41,713,920	59.03
Belanja Uang Makan PNS	175,370,000	211,726,000	(17.17)
Belanja Tunjangan Umum PNS	40,930,000	35,720,000	14.59
Belanja Uang Lembur	-	85,284,000	(100.00)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1,303,214,017	2,499,257,598	(47.86)
Jumlah Belanja kotor	4,304,980,779	3,803,656,814	13.18
Pengembalian Belanja Pegawai	740,472	1,420,034	(47.86)
Jumlah Belanja	4,304,240,307	3,802,236,780	13.20

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp12,746,676,825 dan Rp2,570,553,355. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 395.87% dari Realisasi TA 2021.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Adanya kenaikan belanja barang dikarenakan adanya penambahan pagu belanja barang.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Barang Operasional	2,997,610,951	686,398,338	336.72
Belanja Barang Non Operasional	923,282,645	170,543,150	441.38
Belanja Barang Persediaan Barang	5,000,000	65,692,749	(92.39)
Belanja Jasa	2,193,120,166	352,269,849	522.57
Belanja Pemeliharaan	1,506,735,670	371,264,639	305.84
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5,131,381,493	924,930,411	454.79
Jumlah Belanja Kotor	12,757,130,925	2,571,099,136	396.17
Pengembalian Belanja	10,454,100	545,781	1,815.44
Jumlah Belanja	12,746,676,825	2,570,553,355	395.87

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp42,250,000 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2022

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan	-	40,050,000	-
Belanja Barang Non Operasional -	-	-	-
Belanja Barang Persediaan - Penanganan	-	-	-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi	-	2,200,000	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan	-	-	-
Jumlah Belanja	-	42,250,000	-

Realisasi Belanja Modal
Rp209,650,000

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp209,650,000 dan Rp0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 0.00% dibandingkan TA 2021 disebabkan oleh Tahun anggaran 2021 tidak terdapat pagu belanja modal..

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	209,650,000	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	209,650,000	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	209,650,000	-	-

Realisasi Belanja Modal Tanah Rp0

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2022 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan oleh Tahun anggaran 2021 tidak terdapat pagu belanja modal tanah..

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp209,650,000

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp209,650,000 dan Rp0, mengalami kenaikan sebesar 0.00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan oleh Tahun anggaran 2021 tidak terdapat pagu belanja modal peralatan dan mesin.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	209,650,000	-	-
Jumlah Belanja Kotor	209,650,000	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	209,650,000	-	-

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2021. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Tahun anggaran 2021 tidak terdapat pagu belanja modal gedung dan bangunan..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan Tahun anggaran 2021 tidak terdapat pagu belanja modal jalan dan irigasi..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal Lainnya Rp0

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan Tahun anggaran 2021 tidak terdapat pagu belanja modal lainnya..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2022 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2021. Belanja Bantuan Sosial Tahun anggaran 2021 tidak terdapat pagu belanja sosial..

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

Alokasi belanja penanganan COVID-19 pada lingkungan KPU Provinsi Gorontalo diperuntukkan untuk pembelian Alat Pelindung Diri berupa Masker, Hand Sanitizer, Tisu, dan disinfektan. Selain itu, untuk belanja jasa penanganan COVID-19 diperuntukkan untuk pembiayaan Rapid atau Sawab Test pegawai dilingkungan KPU Provinsi Gorontalo.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Keterangan	TAHUN 2022	TAHUN 2021
Rekening Mandiri di brankas yang sudah bentuk kuitansi	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Terdapat kelebihan sebesar Rp 51,- dikarenakan adanya pembulatan nilai dikarenakan ketiadaan uang pecahan

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Keterangan	TAHUN 2022	TAHUN 2021
	-	-
Jumlah	-	-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Keterangan	TAHUN 2022	TAHUN 2021
	-	-
Jumlah	-	-

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Keterangan	TAHUN 2022	TAHUN 2021
	-	-
Jumlah	-	-

Uang Muka Belanja
(prepayment) Rp0

C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Keterangan	TAHUN 2022	TAHUN 2021
	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp0

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Keterangan	TAHUN 2022	TAHUN 2021
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :

Piutang Perpajakan
Rp0

C.7 Piutang Perpajakan

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Piutang Perpajakan
Rp0

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Pajak	%	Nilai Penyisihan
Piutang Pajak			
Jumlah	-		-

C.2 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka	%	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Jumlah	-		-

C.4 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Jenis	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
	-	-
Jumlah	-	-

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka	%	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Jumlah	-		-

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited)

Jenis	TAHUN 2022	TAHUN 2021
	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka	%	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Jumlah	-		-

Persediaan Rp6,187,920

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp6,187,920 dan Rp6,187,920. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Jenis	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
Barang Konsumsi	6,187,920	6,187,900
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	6,187,920	6,187,900

- Persediaan tersebut merupakan Bilik Suara Aluminium

Persediaan yang Belum Diregister Rp0

C.5 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2022

Debitur	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Debitur	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Jangka Panjang lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2022 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Rp0

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2022 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	%	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang	-		-

Tanah Rp1,511,165,775

C.21 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp1,511,165,775 dan Rp1,511,165,775. Nilai Tanah tersebut Kenaikan Nilai Tanah dikarenakan adanya Hibah Tanah dari Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada KPU Provinsi Gorontalo.. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	1,511,165,775
Mutasi tambah :	
	-
Mutasi kurang :	
	-
Saldo per 31 Desember 2022	1,511,165,775

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2022

No.	Luas	Lokasi	Nilai
Jumlah			-

Tanah Belum Diregister Rp0

C.22 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan
Mesin
Rp2,847,143,223

C.23 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp2,847,143,223 dan Rp3,280,904,219. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	3,280,904,219
Mutasi tambah:	
Pembelian	209,650,000
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan	149,600,000
Mutasi Kurang:	
Penghentiaian Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2022	3,640,154,219
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(2,426,656,442)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	1,213,497,777

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- a. Mutasi tambah berasal dari Pembelian Peralatan dan mesin berupa Kamera, Laptop, dan Printer. Serta terdapat Aset yang digunakan kembali dari yang sebelumnya dihentikan penggunaannya.

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Mutasi kurang berasal dari barang-barang yang dihentikan penggunaannya dikarenakan hangus terbakar

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan
Mesin Belum
Diregister Rp0

C.24 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan
Bangunan
Rp5,188,267,300

C.25 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5,188,267,300 dan Rp5,188,267,300. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	5,188,267,300
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2022	5,188,267,300
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(685,202,874)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	4,503,064,426

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

-

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan
Bangunan Belum

C.26 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-

Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp23,039,080

C.27 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.23,039,080 dan Rp.23,039,080. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	23,039,080
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	23,039,080
Akumulasi Penyusutan s.d.	(6,360,368)
Nilai Buku per	16,678,712

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

-

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister Rp0

C.28 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Aset Tetap Lainnya Rp0

C.29 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2022	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-

Mutasi tambah/kurang:

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap yang Belum Diregister Rp0

C.30 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.31 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2022	-

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp3,118,219,684

C.32 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp3,118,219,684 dan Rp3,438,866,104. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2022

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2,847,143,223	(2,426,656,442)	420,486,781
2	Gedung dan Bangunan	5,188,267,300	(685,202,874)	4,503,064,426
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	23,039,080	(6,360,368)	16,678,712
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan	8,058,449,603	(3,118,219,684)	4,940,229,919

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp0

C.33 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Unaudited) Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah
-		-
	Jumlah	-

C.34 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 31 Desember 2021	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2022	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

C.35 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	-

C.36 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2022	T.A. 2021
-	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

-

C.37 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2022	T.A. 2021
-	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

-

Aset Lain-lain
Rp1,120,982,946

C.38 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp1,120,982,946 dan Rp477,571,950. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	477,571,950
Mutasi tambah:	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2022	477,571,950
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	(1,096,324,584)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	(618,752,634)

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

Mutasi Kurang

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada

Aset Lainnya yang
Belum Diregister

C.39 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya

C.40 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp1,096,324,584 dan Rp437,807,663. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	1,120,982,946	(1,096,324,584)	24,658,362
-	-	-	-
Total	1,120,982,946	(1,096,324,584)	24,658,362

Utang kepada
Pihak Ketiga Rp0

C.41 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp19,350,000. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A.2021
	-	-
Total	-	19,350,000

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp0

C.42 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A.2021
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

Merupakan transaksi Bendahara yang belum dibuatkan SPM GUP

Hibah Yang Belum Disahkan Rp0

C.43 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
Hibah yang belum disahkan	
Jumlah	-

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

hibah yang belum disahkan berasal merupakan Hibah Tanah yang diterima KPU Provinsi Gorontalo pada Tahun 2020, yang akan dilakukan pengesahan bulan Desember, sesuai jadwal pengesahan Hibah Yang diterima Tahun Lalu.

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp0

C.44 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A.2021
	-	-
Total	-	-

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

Pendapatan Diterima Dimuka Rp0

C.45 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2021
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.46 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Besar Uang Persediaan KPU Provinsi Gorontalo yaitu 60.000.000 berupa uang fisik dan 40.000.000 berupa Uang Persediaan berupa Kartu Kredit Pemerintah yang diperuntukkan untuk belanja perjalanan dinas untuk pemesanan tiket pesawat dan hotel.

*Utang Jangka
Pendek Lainnya*

C.47 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A.2021
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

*Ekuitas
Rp6,482,241,976*

C.48 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6,482,241,976. dan Rp6,591,112,477. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 49 Catatan Penting Lainnya neraca

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan
Perpajakan Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan
Negara Bukan
Pajak Rp370,100

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp370,100 dan Rp75,874. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 387.78. Hal tersebut disebabkan oleh PNPB pada tahun 2021 berupa jasa giro atas rekening Hibah Non Pilkada sedangkan PNPB pada tahun 2020 merupakan pengembalian pembulatan belanja pegawai di tahun sebelumnya.. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	%
Pendapatan bukan Pajak lain-lain	370,100	-	-
	-	-	-
Jumlah	370,100.00	75,874.00	387.78

Beban Pegawai
Rp4,284,890,307

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4,284,890,307 dan Rp3,821,586,780.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2022 sebesar 12.12 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh . Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Gaji Pokok PNS	1,176,769,180	756,866,720	55.48
Beban Pembulatan Gaji PNS	20,218	14,541	39.04
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	78,956,424	45,902,986	72.01
Beban Tunj. Anak PNS	23,740,618	11,678,720	103.28
Beban Tunj. Struktural PNS	140,540,000	109,330,000	28.55
Beban Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	6,330,130	4,742,295	33.48
Beban Tunj. Beras PNS	66,336,720	41,713,920	59.03
Beban Uang Makan PNS	156,020,000	231,076,000	(32.48)
Beban Tunjangan Umum PNS	40,190,000	35,720,000	12.51
Beban Uang Lembur	-	85,284,000	(100.00)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1,303,214,017	2,499,257,598	(47.86)
Jumlah	4,284,890,307	3,821,586,780	12.12

Beban Persediaan
Rp5,000,000

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 91.69 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh Kenaikan beban persediaan disebabkan karena bertambahnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Persediaan konsumsi	5,000,000	51,634,749	(90.32)
Beban Persediaan bahan baku	-	8,568,600	(100.00)
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	5,000,000.00	60,203,349	(91.69)

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 405.36 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh . Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Keperluan Perkantoran	2,723,480,201	478,722,138	468.91
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,668,250	671,000	446.68
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	126,840,000	131,960,000	(3.88)
Beban Barang Operasional Lainnya	103,572,500	21,702,500	377.24
Beban Bahan	758,460,645	100,563,150	654.21
Beban Honor Output Kegiatan	155,610,000	23,500,000	562.17
Beban Barang Non Operasional Lainnya	6,012,000	46,480,000	(87.07)
Beban Langganan Listrik	105,369,269	74,026,589	42.34
Beban Langganan Telepon	15,274,197	15,170,760	0.68
Beban Langganan Air	1,699,000	25,156,000	(93.25)
Beban Jasa Lainnya	928,687,700	181,720,000	411.05
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	5,175,000	(100.00)
Beban Jasa Profesi	44,000,000	2,800,000	1,471.43
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	40,050,000	53,342,700	(24.92)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,200,000	30,271,500	(92.73)
Jumlah	6,110,813,762	1,209,211,337.00	405.36

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 299.93 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,038,321,060	278,607,360	272.68
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	468,414,610	92,657,279	405.53
Jumlah	1,506,735,670	376,754,039	299.93

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 454.33 persen disebabkan oleh . Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 dan 2021 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Perjalanan Biasa	3,690,123,006	660,570,499	458.63
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	161,500,000	15,450,000	945.31
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	428,416,382	176,155,000	143.20
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	844,088,005	72,209,131	1,068.95
Jumlah	5,124,127,393.00	924,384,630	454.33

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2021	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp337,870,501 dan Rp403,234,075.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	191,696,277	265,550,315	(27.81)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	129,242,322	129,242,320	0.00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	239,925	239,925	-
Beban Penyusutan Jaringan	336,052	336,052	-
Jumlah Penyusutan	337,870,501	403,234,075	(16.21)
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	337,870,501	403,234,075	(16.21)

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3,750,100 dan Rp227,800

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3,750,100	227,800.00	1,546
Jumlah	3,750,100.00	227,800	1,546

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp44

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp44 dan Rp41,481,500.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	44	1,400.00	(96.86)
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	41,480,100.00	(100.00)
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	-	-	-
Jumlah	44.00	41,481,500	(100.00)

Pos Luar Biasa
Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan Rusak/Usang	-	65,415,900.00	(100)
Jumlah	-	65,415,900	(100)

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Unaudited) 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp6,591,112,477.0

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar

Defisit LO Rp.-
17,365,317,389.00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.-17,365,317,389.00 dan Rp.-6,753,589,036.00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2022 dan 2021

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.-15,519,400 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset Rp.0.00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
	-
Jumlah	-

Koreksi Atas Reklasifikasi

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.-

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset Rp.0.00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2022

Jenis Aset	Nilai Koreksi
	-
Jumlah	-

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini .

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2022

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2022

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
	-
Jumlah	-

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.17,256,446,888 dan Rp.7,161,075,736. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2022

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	17,260,567,132
Diterima dari Entitas Lain	(4,120,244)
	-
Jumlah	17,256,446,888

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DKEL sebesar Rp 17,260,567,132, sedangkan DDEL sebesar Rp 4,120,244

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Pengesahan Hibah Langsung Tahun 2022

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
Jumlah		-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2022

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah	-	-
Jumlah		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2022 disajikan pada lampiran

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.6,482,241,976.00 dan Rp.6,591,112,477.00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

LAMPIRAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU PROVINSI GORONTALO 654556

Tgl Data : 08/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/23 9:23 AM

Halaman : 2

lap_ira_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	17,766,944,000	17,260,567,132	506,376,868	97	6,441,775,000	6,372,790,135	68,984,865	99
C	PEMBIAYAAN				0				0

Keterangan :

FINAL

GORONTALO, 8 Mei 2023

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

DRS. MUKTI ABDULLATIF MILE, M.SI

197201241992031002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 3100
SATUAN KERJA : 654556
JENIS SATUAN KERJA : KD

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
GORONTALO
KPU PROVINSI GORONTALO

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 08/05/23 9:25 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 8/5/23 7:18 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	643,261,000	1,184,339,000	1,176,769,180	0	1,176,769,180	99.36	7,569,820
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14,000	23,000	20,690	472	20,218	89.96	2,782
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	37,740,000	79,000,000	78,956,424	0	78,956,424	99.94	43,576
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	8,581,000	23,750,000	23,740,618	0	23,740,618	99.96	9,382
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	110,950,000	140,540,000	140,540,000	0	140,540,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	4,211,000	7,000,000	6,330,130	0	6,330,130	90.43	669,870
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	34,762,000	69,000,000	66,336,720	0	66,336,720	96.14	2,663,280
511129	Belanja Uang Makan PNS	226,156,000	175,600,000	175,370,000	0	175,370,000	99.87	230,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	33,500,000	43,000,000	40,930,000	740,000	40,190,000	95.19	2,810,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	1,099,176,000	1,722,253,000	1,708,993,762	740,472	1,708,253,290	99.23	13,999,710
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	1,228,175,000	1,292,773,000	1,292,773,000	0	1,292,773,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	1,228,175,000	1,292,773,000	1,292,773,000	0	1,292,773,000	100	0
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	0	5,480,000	0	0	0	0	5,480,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	0	5,480,000	0	0	0	0	5,480,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1,219,062,000	1,305,800,000	1,303,214,017	0	1,303,214,017	99.8	2,585,983
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	1,219,062,000	1,305,800,000	1,303,214,017	0	1,303,214,017	99.8	2,585,983
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	3,546,413,000	4,326,306,000	4,304,980,779	740,472	4,304,240,307	99.51	22,065,693
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	470,924,000	2,751,173,000	2,723,480,201	0	2,723,480,201	98.99	27,692,799
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,040,000	4,062,000	3,668,250	0	3,668,250	90.31	393,750
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	107,040,000	126,840,000	126,840,000	0	126,840,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	36,000,000	112,048,000	103,572,500	0	103,572,500	92.44	8,475,500
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	19,780,000	41,234,000	40,050,000	0	40,050,000	97.13	1,184,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	635,784,000	3,035,357,000	2,997,610,951	0	2,997,610,951	98.76	37,746,049
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	0	837,049,000	758,460,645	0	758,460,645	90.61	78,588,355
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	0	158,960,000	158,810,000	3,200,000	155,610,000	99.91	3,350,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 3100
SATUAN KERJA : 654556
JENIS SATUAN KERJA : KD

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
GORONTALO
KPU PROVINSI GORONTALO

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 08/05/23 9:25 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 8/5/23 7:18 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	780,832,000	7,010,000	6,012,000	0	6,012,000	85.76	998,000
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	0	11,700,000	0	0	0	0	11,700,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	780,832,000	1,014,719,000	923,282,645	3,200,000	920,082,645	90.99	94,636,355
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	100	0
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	100,029,000	106,170,000	105,369,269	0	105,369,269	99.25	800,731
522112	Belanja Langganan Telepon	10,800,000	15,307,000	15,274,197	0	15,274,197	99.79	32,803
522113	Belanja Langganan Air	543,000	1,706,000	1,699,000	0	1,699,000	99.59	7,000
522141	Belanja Sewa	0	1,105,970,000	1,095,890,000	0	1,095,890,000	99.09	10,080,000
522151	Belanja Jasa Profesi	0	63,600,000	44,000,000	0	44,000,000	69.18	19,600,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	43,000,000	947,947,000	928,687,700	0	928,687,700	97.97	19,259,300
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	3,550,000	2,200,000	0	2,200,000	61.97	1,350,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	154,372,000	2,244,250,000	2,193,120,166	0	2,193,120,166	97.72	51,129,834
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	74,300,000	1,044,107,000	1,038,321,060	0	1,038,321,060	99.45	5,785,940
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	66,387,000	487,611,000	468,414,610	0	468,414,610	96.06	19,196,390
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	140,687,000	1,531,718,000	1,506,735,670	0	1,506,735,670	98.37	24,982,330
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	450,000	3,929,485,000	3,690,302,106	4,679,100	3,685,623,006	93.91	243,861,994
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	170,500,000	166,000,000	0	166,000,000	97.36	4,500,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	446,730,000	429,866,382	1,450,000	428,416,382	96.23	18,313,618
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	853,079,000	845,213,005	1,125,000	844,088,005	99.08	8,990,995
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	450,000	5,399,794,000	5,131,381,493	7,254,100	5,124,127,393	95.03	275,666,607
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,712,125,000	13,230,838,000	12,757,130,925	10,454,100	12,746,676,825	96.42	484,161,175
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	209,800,000	209,650,000	0	209,650,000	99.93	150,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	209,800,000	209,650,000	0	209,650,000	99.93	150,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	209,800,000	209,650,000	0	209,650,000	99.93	150,000
	JUMLAH BELANJA	5,258,538,000	17,766,944,000	17,271,761,704	11,194,572	17,260,567,132	97.21	506,376,868

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 3100 **GORONTALO**
SATUAN KERJA : 654556 **KPU PROVINSI GORONTALO**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
 Tanggal : 08/05/23 9:26 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	3,750,100	0	3,750,100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	3,750,100	0	3,750,100	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	44	0	44	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	370,100	0	370,100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	370,144	0	370,144	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	4,120,244	0	4,120,244	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	4,120,244	0	4,120,244	

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (3100) GORONTALO
SATUAN KERJA : (654556) KPU PROVINSI GORONTALO

Tgl Data : 08/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/23 9:23 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	6,187,920	6,187,920	0	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	6,187,920	6,187,920	0	0.00
ASET TETAP				
Tanah	1,511,165,775	1,511,165,775	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,847,143,223	3,280,904,219	(433,760,996)	(13.22)
Gedung dan Bangunan	5,188,267,300	5,188,267,300	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	23,039,080	23,039,080	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,118,219,684)	(3,438,866,104)	320,646,420	(9.32)
JUMLAH ASET TETAP	6,451,395,694	6,564,510,270	(113,114,576)	(1.72)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	1,120,982,946	477,571,950	643,410,996	134.73
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1,096,324,584)	(437,807,663)	(658,516,921)	150.41
JUMLAH ASET LAINNYA	24,658,362	39,764,287	(15,105,925)	(37.99)
JUMLAH ASET	6,482,241,976	6,610,462,477	(128,220,501)	(1.94)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	0	19,350,000	(19,350,000)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	19,350,000	(19,350,000)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN	0	19,350,000	(19,350,000)	(100.00)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	6,482,241,976	6,591,112,477	(108,870,501)	(1.65)
JUMLAH EKUITAS	6,482,241,976	6,591,112,477	(108,870,501)	(1.65)
JUMLAH EKUITAS	6,482,241,976	6,591,112,477	(108,870,501)	(1.65)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6,482,241,976	6,610,462,477	(128,220,501)	(1.94)

Keterangan :

FINAL

GORONTALO, 8 Mei 2023

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

DRS. MUKTI ABDULLATIF MILE, M.SI

197201241992031002

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (3100) GORONTALO
 SATUAN KERJA : (654556) KPU PROVINSI GORONTALO

Tgl Data : 08/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/23 9:23 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117199	Persediaan Lainnya	6,187,920	0
0.0	131111	Tanah	1,511,165,775	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,847,143,223	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	5,188,267,300	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	9,597,000	0
0.0	134113	Jaringan	13,442,080	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,426,656,442
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	685,202,874
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	1,319,588
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	5,040,780
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1,120,982,946	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	1,096,324,584
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	17,260,567,132
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	4,120,244	0
0.0	391111	Ekuitas	0	6,591,112,477
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	3,750,100
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	44
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	370,100
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,176,769,180	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	20,218	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	78,956,424	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	23,740,618	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	140,540,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	6,330,130	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	66,336,720	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	156,020,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	40,190,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	1,292,773,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1,303,214,017	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	2,723,480,201	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,668,250	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	126,840,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	103,572,500	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	40,050,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	758,460,645	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	155,610,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	6,012,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (3100) GORONTALO
 SATUAN KERJA : (654556) KPU PROVINSI GORONTALO

Tgl Data : 08/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/23 9:23 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	105,369,269	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	15,274,197	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,699,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,095,890,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	44,000,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	928,687,700	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,200,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,038,321,060	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	468,414,610	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	3,690,123,006	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	161,500,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	428,416,382	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	844,088,005	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	191,696,277	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	129,242,322	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	239,925	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	336,052	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	16,355,925	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	5,000,000	0
JUMLAH			28,070,344,121	28,070,344,121

Keterangan :

FINAL

GORONTALO, 8 Mei 2023

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

DRS. MUKTI ABDULLATIF MILE, M.SI

197201241992031002

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (3100) GORONTALO
 SATUAN KERJA : (654556) KPU PROVINSI GORONTALO

Tgl Data : 08/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/23 9:23 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,723,480,201	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	1,292,773,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6,012,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	1,095,890,000	0
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	44
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	40,050,000	0
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,176,769,180	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	40,930,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	166,000,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	758,460,645	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5,000,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	740,000
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	1,125,000
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	140,540,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	6,330,130	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	44,000,000	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	1,450,000
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	78,956,424	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	66,336,720	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1,303,214,017	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	928,687,700	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	4,679,100
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,200,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	3,690,302,106	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	429,866,382	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	126,840,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	103,572,500	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	158,810,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	472
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	3,200,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	3,750,100
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	17,260,567,132
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20,690	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	15,274,197	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	1,699,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,038,321,060	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	468,414,610	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (3100) GORONTALO
SATUAN KERJA : (654556) KPU PROVINSI GORONTALO

Tgl Data : 08/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/23 9:23 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	370,100
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	23,740,618	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	175,370,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	845,213,005	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	209,650,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,668,250	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	105,369,269	0
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	4,120,244	0
JUMLAH			17,275,881,948	17,275,881,948

Keterangan :

FINAL

GORONTALO, 8 Mei 2023

Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARISDRS. MUKTI ABDULLATIF MILE, M.SI
197201241992031002

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (3100) GORONTALO
SATUAN KERJA : (654556) KPU PROVINSI GORONTALO

Tgl Data : 08/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/23 9:22 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	370,100	75,874	294,226	387.782
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	370,100	75,874	294,226	387.782
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	370,100	75,874	294,226	387.782
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	4,284,890,307	3,821,586,780	463,303,527	12.123
Beban Persediaan	5,000,000	60,203,349	(55,203,349)	(91.695)
Beban Barang dan Jasa	6,110,813,762	1,209,211,337	4,901,602,425	405.355
Beban Pemeliharaan	1,506,735,670	376,754,039	1,129,981,631	299.926
Beban Perjalanan Dinas	5,124,127,393	924,384,630	4,199,742,763	454.328
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (3100) GORONTALO
SATUAN KERJA : (654556) KPU PROVINSI GORONTALO

Tgl Data : 08/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/23 9:22 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	337,870,501	403,234,075	(65,363,574)	(16.21)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	17,369,437,633	6,795,374,210	10,574,063,423	155.607
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(17,369,067,533)	(6,795,298,336)	(10,573,769,197)	155.604
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	3,750,100	227,800	3,522,300	1,546.25
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	3,750,100	227,800	3,522,300	1,546.25
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	44	41,481,500	(41,481,456)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	44	41,481,500	(41,481,456)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	3,750,144	41,709,300	(37,959,156)	(91.009)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(17,365,317,389)	(6,753,589,036)	(10,611,728,353)	157.127
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(17,365,317,389)	(6,753,589,036)	(10,611,728,353)	157.127

Keterangan :

FINAL

GORONTALO, 8 Mei 2023

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

DRS. MUKTI ABDULLATIF MILE, M.SI

197201241992031002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (3100) GORONTALO
SATUAN KERJA : (654556) KPU PROVINSI GORONTALO

Tgl Data : 08/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/23 9:22 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	6,591,112,477	6,199,145,177	391,967,300	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(17,365,317,389)	(6,753,589,036)	(10,611,728,353)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(15,519,400)	15,519,400	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	(15,519,400)	15,519,400	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	17,256,446,888	7,161,075,736	10,095,371,152	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(108,870,501)	391,967,300	(500,837,801)	-
EKUITAS AKHIR	6,482,241,976	6,591,112,477	(108,870,501)	-

Keterangan :

FINAL

GORONTALO, 8 Mei 2023

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

DRS. MUKTI ABDULLATIF MILE, M.SI

197201241992031002